

PETITION 50 AND IT'S IMPACT ON THE TIME NEW ORDER IN 1980-1985

Andriko Aprilinata*, Prof. Dr. Isjoni, Drs. Tugiman, M.S*****

andrikoaprilinata@gmail.com, Isjoni@yahoo.com, tugiman_unri@yahoo.com

Phone Number: 081268617293

*Historical Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *The Indonesian nation in its history has experienced several government regimes with their respective advantages and disadvantages. The New Order began when there was a transfer of power from President Soeharto to General Suharto. The transfer of power was written in a March Order (Supersemar) in 1966, made by President Soekarno. The New Order was confirmed in MPRS Decree No. IX / MPRS / 1996 General Suharto to carry out the power of government. During the New Order Government, the Indonesian people naturally experienced various political problems, namely the existence and development of the 50th Petition during the New Order era. The purpose of this paper is as follows: (1) To find out the background of the formation of Petition 50 during the New Order, (2) To find out the process of preparing Petition 50 during the New Order, (3) To find out the government's response to Petition 50 during the Order New In 1980-1985, (4) To find out the impact of the Petition 50 during the New Order in 1980-1985. In this study the authors used the historical method. What is meant by the historical method is a research method used to make a systematic and objective reconstruction of the past by collecting data, evaluating in detail the evidence in detail to explain the facts and obtain strong conclusions. The 50th petition began when President Soeharto's speech in Pekanbaru in 1980 and the second speech in Cijantung on 16 April 1980 used Pancasila to bring down political opponents. This 50 petition had an impact on the figures involved because it was considered against President Soeharto.*

Key Words: *New Order, Petition 50, Impact of Petition 50*

PETISI 50 DAN DAMPAKNYA PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1980-1985

Andriko Aprilinata*, Prof. Dr. Isjoni, Drs. Tugiman, M.S******

andrikoaprilinata@gmail.com, Isjoni@yahoo.com, tugiman_unri@yahoo.com

Nomor HP: 081268617293

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Bangsa Indonesia dalam lintas sejarah sudah mengalami beberapa rezim pemerintahan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orde Baru dimulai saat adanya peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Jendral Soeharto. Peralihan kekuasaan itu tertulis dalam Surat Perintah Sbelah Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang di buat oleh Presiden Soekarno. Dalam masa Pemerintahan Orde Baru bangsa Indonesia tentunya mengalami berbagai permasalahan politik, yaitu eksistensi dan perkembangan Petisi 50 pada masa pemerintahan Orde Baru. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebgai berikut: (1) Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Petisi 50 pada masa Orde Baru, (2) Untuk mengetahui Proses penyusunan Petisi 50 pada masa Orde Baru, (3) Untuk mengetahui respon pemerintah terhadap Petisi 50 pada masa Orde Baru Pada tahun 1980-1985, (4) Untuk mengetahui dampak Petisi 50 pada masa Orde Baru pada tahun 1980-1985. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis. Yang di maksud dengan metode hsitoris adalah metode penelitian yang di gunakan untuk membuat rekontruksi masa lampau secara sistematif dan objektif dengan cara mengunpulkan data, mengevaluasi secara detail bukti-bukti secara detail untuk menjelaskan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Petisi 50 berawal ketika pidato Presiden Soeharto di pekanbaru tanggal 1980 dan pidato kedua di Cijantung pada tanggal 16 april 1980 yang menggunakan Pancasila untuk menjatuhkan lawan politiknya. Petisi 50 tidak langsung jadi tetapi melalui beberapa kali rapat di gedung veteran himmga akhirnya keluar pernyataan yang dui tanda tangani oleh 50 orang. Pemerintah merespon petisi tersebut meyakini keberatan terhadap petisi itu. Petisi 50 ini berdampak terhadap para tokoh yang terlibat karena dianggap melawan Presiden Soeharto dengan memasukan tokoh-tokoh yang menandatangani ke dalam daftar yang diawasi.

Kata Kunci: Orde Baru, Petisi 50, Dampak Petisi 50

PENDAHULUAN

Orde Baru lahir dari adanya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto. Kebijakan peralihan kekuasaan ini sendiri dibuat oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jendral Basuki Rachmat, Brigadir jendral M. Yusuf, Brigadir Jendral Sabur, dan Brigadir Amir Machmud. Kebijakan itu tertulis dalam surat perintah sebelas maret (Supersemar) pada tahun 1966.¹

Pemerintahan orde baru dimulai sejak tahun 1966-1968, dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret, yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden hal ini berdasarkan ketetapan MPRS No. XLV/MPRS/1968, sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 maret 1983, beliau mendapat penghargaan sebagaio Bapak Pembangunan Nasional.²

Dengan maksud menghindari ancaman-amcama ideologis dari kiri (yaitu Komunis dan kanan (yaitu Islam Politik), pada tahun tahun 1978 pemerintah Orde Baru mengeluarkan instruksi yang mengharuskan dijadikannya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di departemen-departemen pemerintahan, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat kerja. Sehingga mengundang kritik dan sindiran dari kaum intelektual.

ada sebuah rapat umum dengan para ketua angkatan ABRI pada tanggal 27 maret 1980, soeharto mengisahkan bahwa ABRI telah berjanji sebagai pelindung pacasila maupun Undang-undang 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amandemen. Soeharto juga berbicara bahwa sebuah daya sosial-politik, ABRI harus mitra-mitra polittik yang benar yang telah terbukti mau mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, karena masa itu ada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang meragukannya. Soeharto lalu mengulangi fikiran-fikirannya ini dalam sebuah pidato pada peringatan hari jadi Kopassus. Pidatonya ini mengundang tanggapan yang keras sehingga munculah petisi 50.

Mengetahui lebih lanjut tentang petisi 50 dan dampaknya pada masa orde baru tahun 1980-1985, secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Petisi 50 pada masa Orde Baru?
2. Untuk mengetahui proses penyusunan Pertisi 50 pada masa Orde Baru ?
3. Untuk mengetahui respon pemerintah terhadap Petisi 50 pada masa Orde Baru pada tahun 1980-1985?
4. Untuk mengetahui dampak Petisi 50 pada masa Orde Baru pada tahun 1980-1985?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu suatu alat pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mencari kebenaran untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru, menguji atau untuk menjawab suatu masalah yang dihadapi. Suatu metode sejarah dapat disebut sejarah apabila dalam uraian kajiannya berisi tentang sejarah kejadian atau peristiwa masa lampau yang tersusun sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk membuat rokonstruksi

¹ Djiwandono, J Soedjatidan T.A Legowo, Revitalisasi Sistem Politik Indonesia, Jakarta: CSIS, 1996, hl;m. 34.

² Ghalia Indonesia, ketetapan-ketetapan MPR, 1978-1983, (Jakarta: 1968) hlm 43.

ulang masa lampau secara sistematis dan objek dengan pengumpulan, mengevaluasi, verifikasi dan mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.³

Kondisi Politik Menjelang Petisi 50

Proses peralihan kekuasaan politik dari Soekarno ke Soeharto diawali dengan gerakan 30 September. Dimana sebelumnya, Soekarno mengalami beberapa kali akan dijatuhkan sebagai presiden republic Indonesia melalui berbagai upaya pembunuhan. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan Negara pada pelaksanaa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terjadinya Petisi 50

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia memberi peran social politik yang cukup besar bagi ABRI terutama Angkatan Darat. hal tersebut dilakukan dengan cara menyusun kekuatan bangsa dan Negara untuk mencapai stabilitas nasional dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasioanal.

Dengan maksud menghindarkan ancaman-ancaman ideologis dari kiri (yaitu komunismne) dan kanan (yaitu islam politik), pda tahun 1978 pemerintah Orde Baru mengeluarkan Instruksi yang mengharuskn dijadikannya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di departemen-departemen pemerintah, sekolah-sekolah, tempat-tempat kerja, dan lainnya. Sehingga mengundang kritik dan cemooh dari kaum intelektual.

Pada sebuah rapat umum dengan para pemimin angkatan ABRI pada 27 Maret 1980 di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, Provinsi Riau, Soeharto mengatakan ABRI telah berjanji untuk melindungi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amandemen. Soeharto juga berkata bahwa sebagai sebuah kekuatan social politik, ABRI harus memilih mitra-mitra politik yang banar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Karena saat itu ada kekuatan-kekuatan social-politk yang meragukannya. Ia lalu mengulangi pikiran-pikiran ini dalam sebuah pidato pda bulan berikutnya pada peringatan hari jadi Kopassus.

Pidato-pidato Presiden Soeharto ini mengundang tanggapan-tanggapan. Sejumlah perwira senior semakin tidak tenang. Beberapa jendral yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat (Fosko TNI-Ad) berkumpul unntk membicarakan mengenai pidato-pidato Presiden Soeharto yang telah salah dalam dalam menggunakan Pancasila untuk kepentingan politiknya.

³ Muhammad Nasir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia Hal. 48

⁴ Sulastomo. 2008. *Hari-hari yang panjang transisi Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta. Hlm. 191

B. Petisi 50

Petisi 50 yaitu sebuah dokumen yang pokoknya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Dimana Petisi ini keluar pada tanggal 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah “Ungkapan Keprihatinan” dan ditandatangani oleh 50 orang, karena kalau terlalu banyak akan susah dalam mengajukan ke DPR. Tidak ada target berapa orang yang harus menandatangani petisi tersebut. Karena dianggap 50 orang sudah cukup untuk membawa petisi itu ke DPR. Petisi 50 sendiri di buat di gedung veteran, tidak semua orang yang hadir dalam pembuat petisi itu. Setelah selesai dibuatnya petisi maka surat itu dibawa berkeliling dari rumah ke rumah untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan dari surat itu.⁵

Petisi 50 yang lahir dari keprihatinan masyarakat atas pernyataan-pernyataan-pernyataan President Soeharto yang telah salah mengartikan dasar Negara republic Indonesia yaitu Pancasila.

Tanggal 5 Mei 1980, 50 tokoh bangsa berkumpul untuk membahas pernyataan Soeharto yang merasehkan tersebut. Ke-50 tokoh bangsa tersebut menanda tangani pernyataan mereka yang di beri nama “Ungkapan Keprihatinan”. Orang-orang yang menandatangani “Ungkapan Keprihatinan” itu berasal dari lintas kalangan seperti : tentara, polisi, anggota parlemen, akademisi, birokrat, pengusaha, aktivis, bekas pejabat, bahkan dai.⁶

C. Respon Terhadap Petisi 50

Setelah selesainya penyusunan ungkapan keprihatinan yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh bangsa yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari TNI, polri, politisi, mahasiswa, dan da’i.

Pada tanggal 13 Mei 1980 Petisi 50 di bacakan di depan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan maksud untuk meyakinkan para wakil rakyat agar meminta penjelasan dari Presiden tentang apa maksudnya yang sesungguhnya dengan kedua pidato Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat itu dipimpin oleh Daryatmo merasa terkejut dengan adanya Ungkapan Keprihatinan yang di tandatagani oleh 50 orang. Setelah melihat nama-nama pendukung dari Ungkapan Keprihatinan itu ternyat bukan orang-orang sembarangan. Daryatmo belum bisa bersikap tegas. Ketua DPR berjanji akan secepatnya menyampaikan tuntutan kepada Presiden

Pada tanggal 5 Juli setaelah mengadakan diskusi dengan anggota DPR/MPR, Presiden Soeharto menugaskan Menhaman/Pangab supaya memberikan penjelasan yang diperlukan.

D. Dampak Petisi 50 pada Orde Baru

Surat pernyataan Keprihatinan terhadap pidato-pidato Presiden Soeharto ternyata menghebohkan dan berakibat panjang. Presiden Soeharto tidak menyukai atas

⁵ Ramadahn KH. 1995. *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*. Pustaka Jaya. Jakarta Selatan. Hlm 251-252.

⁶ Baskara Tulus Wardaya. 2007. *Menelusuri akar Otoritarisme di Indonesia* , Hlm. 144

protes yang di ajukan oleh tokoh-tokoh bangsa dalam Surat pernyataan atau disebut juga petisi 50.

Presiden Soeharto yang tidak setuju dengan Petisi 50 memberikan responnya agar tidak menimbulkan keadaan yang berkelanjutan yang dapat menimbulkan ketidak stabilan di pemerintahan dan negara. Presiden langsung bertindak dengan memerintahkan kepada para jajarannya agar melarang orang-orang yang terlibat dalam Petisi 50 untuk mengikuti pemilu ataupun mecalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun Calon legislative. Karena di takutkan akan mengganggu pemerintahan Soeharto.

Presiden Soeharto yang mempunyai kekuasaan atas pemerintah, memerintahkan penangkapan kepada beberapa anggota Petisi yang yang di anggap melakukan penghinaan kepada Presiden. Salah satu orang yang mengalaminya yaitu M. Jasin “akibat dari Petisi 50 saya secara pribadi dianggap telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Soeharto, mengganggu kepentingan umum”.

Untuk mengatasi agar tidak berkembangnya berita mengenai Petisi 50 Soeharto sebagai Presiden yang mempunyai kekuatan politik yang besar dan memiliki kekuasaan melarang media massa cetak dan elektronik untuk membuat berita-berita tentang Petisi 50. Di samping melarang media massa presiden juga melarang orang-orang yang terlibat dalam Petisi 50 keluar Indonesia karena ditakutkan akan berpolitik di luar Indonesia.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Setelah penulis memaparkan mengenai peristiwa Petisi 50 dan Dampaknya pada Orde Baru tahun 1980-1985, maka bagian akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan yang mana langkah ini di ambil setelah penulis merasa yakin bahwa penulisan ini telah sesuai dengan sistematika penulisan skripsi. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pidato Presiden Soeharto pada tanggal 27 Maret di markas ABRI, Pekanbaru dan tanggal 16 April di Markas Kpmando Pasukan Sandi Yudha (Kopassanda) / Kopasus di Cijantung dianggap salah dalam mengartikan pascasila. Sehingga munculnya Ungkapan Keprihatinan yang dibuat oleh tokoh-tokoh bangsa terdiri dari 50 orang maka disebut dengan Petisi 50.
2. Presiden Soeharto menganggap orang-orang yang terlibat dalam Petisi 50 dianggap menentang pemerintah dan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam negara.
3. Pemerintahan di pimpinan Soeharto tidak segan melakukan tindakan represif untuk menindak segala gerakan yang dapat mengancam kekuasaanya.
4. Ungkapan Keprihatinan yang di sampaikan oleh anggota Petisi 50 tersebut tidak disukai oleh Presiden Soeharto.
5. Akibat dari aksi Protes terhadap Pidato Presiden Soeharto. Para anggota petisi 50 mulai mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah seperti pencekalan, tidak bisa kredit dan di persulit untuk berusaha, yang berakibat pada politik, hukum, social, dan ekonomi mereka.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya peristiwa Petisi 50 ini di Indonesia, hendaknya para generasi penerus baik dari kalangan pemerintah ataupun masyarakat umum mampu mempertahankan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, dan tidak menyalahgunakan Pancasila demi kepentingan pribadi. Semoga tulisan ini dapat membantu menumbuhkan semangat dan membangun generasi muda sebagai penerus dan pelurus bangsa.
2. Kepada pemerintah, diharapkan dapat menggunakan dasar-dasar Negara dengan sebaik-baiknya., karena sampai hari ini, banyak masyarakat yang tidak tau bahwa pernah terjadi peristiwa Petisi 50 di Jakarta dan tidak adanya bukti fisik dari peristiwa tersebut.
3. Untuk masyarakat agar tetap menjaga dan menumbuhkan rasa persatuan antara sesama. Dan diharapkan kisah sejarah ini tidak hilang sampai generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Baskara Tulus Wardaya. 2007. *Menelusuri akar Otoritarisme di Indonesia*.

Djiwandono, J Soedjatidjan T.A Legowo, 1996. *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta.

Ghalia Indonesia. 1968. *ketetapan-ketetapan MPR, 1978-1983*. Jakarta.

Muhammad Nasir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Ramadhan KH. 1995. *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*. Pustaka Jaya. Jakarta Selatan.

Sulastomo. 2008. *Hari-hari yang panjang transisi Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta.